

PENGARUH SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
TERHADAP KOMITMEN INDONESIA DALAM MEREDUKSI EMISI
KARBON PROTOKOL KYOTO 2009-2014

Oleh Mustika Kusuma Wardani (071012043)

ABSTRAK

Sebagaimana telah banyak diketahui, isu lingkungan hidup telah menjadi isu krusial kekinian dalam dunia internasional. Salah satu isu spesifik terkait lingkungan hidup tersebut adalah perubahan iklim. Karena sifat dari perubahan iklim yang lintas batas, maka negara –sebagai aktor hubungan internasional yang mempunyai kedaulatan tertinggi- mau tak mau harus bersatu padu untuk mencegah dan mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Berangkat dari asumsi ‘common but differentiated responsibilities’, negara dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kemudian membentuk Rezim Lingkungan Internasional yang bernama Protokol Kyoto pada tahun 1997. Protokol Kyoto mempunyai target pereduksian emisi karbon, komitmen pereduksian emisi karbon pertama adalah tahun 2009-2012. Komitmen pereduksian pertama ini secara umum mengalami stagnansi progress yang disebabkan anarkisme negara anggota rezim yang selalu lebih mementingkan kepentingan sendiri. Dalam kondisi yang dilematis ini, Indonesia dengan pemimpin negaranya kala itu, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, menyatakan bahwa Indonesia, yang merupakan negara berkembang dan tidak mempunyai kewajiban mengurangi emisi karbon, secara sukarela mau mengurangi emisi karbonnya sebesar 26% pada tahun 2020, atau bahkan 41% jika dunia internasional mau memberikan dukungan. Pernyataan Yudhoyono tersebut dinyatakan pada tahun 2009 di Kopenhagen, Denmark. Indonesia sendiri, ketika era kepemimpinan Yudhoyono (2004-2014), memang kerap berkontribusi dalam isu-isu lingkungan, hal ini sesuai dengan salah satu fokus dari arah politik luar negeri Indonesia yang pro terhadap penyelamatan lingkungan. Sebuah fokus yang belum pernah ditangani secara mendalam oleh presiden-presiden Indonesia sebelum Yudhoyono. Dengan menggunakan Level Analisis Individu, yaitu teori Psikobiografi dan Worldview dari Jerrold M. Post, penulis akan mencoba menganalisis sejauh apa peran Yudhoyono terkait politik luar negeri Indonesia dalam rezim lingkungan internasional Protokol Kyoto.

Kata Kunci: Susilo Bambang Yudhoyono, level analisis individu, Protokol Kyoto, Psikobiografi dan Worldview.

ABSTRACT

As we have known, environment-related issues have been being crucial issues in international world. One of them is climate change. Climate change is a global catastrophe which affects all countries ever exist in the world. Nation states as international relations actor with highest sovereignty offer a solution about it by making an international environmental regime under the auspices of United Nations named Kyoto Protocol. Kyoto Protocol was founded in Kyoto, Japan in 1997 and has its own targets about carbon reduction. The first period of carbon reduction was in 2009-2012 and generally had nothing big to offer. This stagnation was commonly caused by the anarchy of the members who tend to notice their national interests than the agreements within Kyoto Protocol. In this condition of dilemma, Indonesia along with its president at that time Susilo Bambang Yudhoyono stepped forward offered their progressive solution. As a non-Annex I country with no obligation to do a carbon reduction, Indonesia disposed to do some efforts reducing its carbon pollution as much as 26% or 41% with international assistance in 2020. This statement of reduction said by Yudhoyono in 2009 in Copenhagen, Denmark. Indonesia itself, in the era of Yudhoyono's presidency, had done enormous contributions in the term of environmental issues, suitable with one of the focus of Indonesia's foreign policy at that time, protecting the environment. By using Individual Level of Analysis, particularly Psychobiography and Worldview theory by Jerrold M. Post, the writer will analyse how far is the role of Susilo Bambang Yudhoyono, as president of Indonesia at that time, in Indonesia's foreign policy within international environmental regime, Kyoto protocol.

Keywords: Susilo Bambang Yudhoyono, individual level of analysis Kyoto Protocol, Psychobiography and Worldview.

Perubahan iklim telah menjelma menjadi isu krusial global yang menuntut untuk segera diselesaikan. Dampak-dampak paling berbahaya yang kemungkinan akan ditimbulkan akibat fenomena perubahan iklim adalah: (1) fenomena munculnya ‘pengungsi iklim’, yaitu mereka yang terusir dari tempat tinggalnya karena naiknya permukaan air laut. Fenomena ‘pengungsi iklim’ ini adalah fenomena multidimensi yang akan menyulut terjadinya fenomena sosial lainnya, misalnya wabah penyakit, kemiskinan, pengangguran, dan keamanan pangan (Warne 2015: 90-99). (2) Munculnya bencana alam yang bisa mereduksi 15 hingga 40 persen populasi manusia di bumi, serta (3) kepunahan flora dan fauna karena aktifitas alih guna lahan hutan ataupun ketidak mampuan adaptasi terhadap iklim yang menghangat (UNFCCC t.t.).

Perubahan iklim sendiri, secara definisi adalah meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi. Umumnya disebabkan oleh kegiatan manusia dalam penggunaan energi yang bersumber dari bahan bakar fosil serta kegiatan alih guna lahan dan kehutanan. Aksi kolektif dari banyak negara sebagai aktor hubungan internasional dengan legitimasi tertinggi, adalah solusi terbaik dalam menghadapi perubahan iklim. Sejauh ini, aksi kolektif yang paling mampu dicapai negara dalam menghadapi fenomena perubahan iklim adalah melalui kerjasama antar negara bangsa dan rezim lingkungan internasional atau Multilateral Environment Agreements (MEAs) bernama Protokol Kyoto yang dibentuk pada tahun 1997 dibawah UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change). Tujuan dari Protokol Kyoto adalah mengakomodir negara-negara anggota untuk mereduksi emisi gas rumah kaca masing-masing sebagai penyebab utama perubahan iklim (O’Neill 2009: 71-74).

Dalam Protokol Kyoto, telah diatur sebuah kesepakatan bahwa hanya negara-negara maju/ industri yang diberikan beban mereduksi emisi karbonnya. Negara-negara ini disebut sebagai negara Annex 1. Sedang negara-negara berkembang (developing) dan negara miskin (under developed) atau disebut sebagai negara non-Annex 1, tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan usaha pengurangan emisi karbon. Pengaturan kesepakatan ini disetujui berdasarkan asumsi yang mengatakan bahwa perubahan iklim adalah tanggung jawab negara industri maju yang telah melakukan aktifitas penyebab meledaknya jumlah emisi gas rumah kaca sejak 150 tahun terakhir. Pembagian beban ini sesuai dengan prinsip: “common but differentiated responsibilities” (UNFCCC t.t.).

Protokol Kyoto, walaupun telah terbentuk pada tahun 1997, namun baru mulai dilaksanakan pada tahun 2005, dan memulai komitmen pereduksian emisi karbon pertama pada tahun 2008 dan berakhir tahun 2012. Pada komitmen pertama pereduksian emisi karbon ini, tercatat 37 negara industri dan European Community menyatakan bersedia mengurangi 5 persen jumlah emisi gas rumah kaca dibandingkan dengan ketika tahun 1990 (UNFCCC t.t.). Kendati telah banyak yang meratifikasi komitmen pertama pereduksian emisi karbon, namun progres penurunan emisi karbon global secara umum masih mengalami stagnansi. Stagnansi ini secara umum disebabkan oleh Amerika Serikat, sebagai polutan terbesar dunia, tidak bersedia mengurangi emisi karbon-nya. Amerika Serikat

sebagai negara Annex I beranggapan bahwa kesepakatan pengurangan emisi yang hanya dibebankan kepada negara industri maju tidak-lah adil untuk dilaksanakan. Didukung fakta yang mengatakan bahwa penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar tidak hanya berasal dari negara maju saja melainkan juga negara berkembang, misalnya Cina dan India (Wangke 2011: 31-32).

Dalam dilemma stagnansi progres ini kemudian Indonesia sebagai non-Annex I pada tahun 2009 di pertemuan tahunan negara anggota Protokol Kyoto di Kopenhagen, diwakili Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan mau mengurangi emisi karbon-nya secara sukarela yaitu sebesar 26 persen atau bahkan 41 persen (bila ada bantuan internasional) pada tahun 2020 (Wangke 2010: 50-51). Pernyataan Yudhoyono dalam mewakili Indonesia dalam diplomasi lingkungan internasional ini penulis anggap sebagai peristiwa yang menarik untuk dikaji. Terutama dalam mengkaji peran Yudhoyono sebagai individu. Apalagi ketika melihat arah kebijakan luar negeri Yudhoyono yang condong ke isu lingkungan ini berlainan dengan seluruh presiden Indonesia yang pernah menjabat sebelum Yudhoyono, tema analisis individu menjadi terlihat menarik untuk dilakukan.

Indonesia sendiri merupakan satu dari sepuluh negara penyumbang emisi karbon terbesar di dunia. Dari sekian banyak aktifitas yang menghasilkan emisi karbon terutama dari deforestasi. Menurut data dari World Research Institute (WRI) tahun 2017, Indonesia menyumbang sebesar 1,7 persen emisi karbon dari total keseluruhan emisi karbon yang ada. Negara penyumbang emisi karbon terbesar adalah China (26,83 persen), Amerika Serikat (14,36 persen), Uni Eropa (9,66 persen), dan India (6,65 persen). Kendati hanya berjumlah 1,7 persen, jumlah emisi karbon Indonesia masuk sepuluh besar negara-negara dengan jumlah emisi karbon terbanyak di dunia. Emisi karbon Indonesia tersebut merupakan sumbangan dari bidang: sebesar 1,12 persen dari bidang energi; 3,22 persen bidang agrikultur; 6,65 persen asap buangan atau waste; dan 0,07 persen bidang industri (Friedrich et al. 2017).

Dalam kajian hubungan internasional, peran pemimpin sebagai individu juga diperhitungkan ketika hendak menganalisis kebijakan luar negeri. Sebagaimana dikatakan Wicaksana (2014), bahwa individu sekalipun mempunyai arti penting dalam membentuk keputusan yang dari awal masa telah mendefinisikan sejarah yang kita ketahui sekarang. Bahwa movement dalam bidang politik sekecil apapun merupakan sejarah yang sejak dahulu dibuat oleh raja-raja, pemimpin negara, atau tokoh-tokoh berpengaruh. Begitu pula dengan Yudhoyono berikut berbagai keunikan pribadinya, merupakan salah satu aktor hubungan internasional yang sedang menulis sejarah itu sendiri.

Breuning menjelaskan (2007), terdapat tiga level analisis yang bisa digunakan untuk menganalisis suatu politik luar negeri, yaitu: individu, negara, dan sistem. Fungsinya adalah untuk memberikan gambaran utuh mengenai suatu fenomena. Dalam jurnal ini, penulis hendak memfokuskan analisis hanya pada level individu saja, yaitu menganalisis Susilo Bambang Yudhoyono sebagai leader, terkait bagaimana perannya dalam Politik Luar Negeri Indonesia ketika

menyatakan ikut serta dalam komitmen pertama pengurangan emisi karbon Protokol Kyoto tahun 2009-2012. Level analisis individu hanya fokus kepada sumbangan pemimpin atau pengambil keputusan didalam kebijakan luar negeri. Bahwa kepribadian dan persepsi dari individu atau leader akhirnya akan mempengaruhi keputusan (decision) politik luar negeri tertentu (Breuning 2007).

Psikobiografi Susilo Bambang Yudhoyono

Ada berbagai macam cara yang bisa digunakan untuk menganalisis bagaimana peran individu khususnya leader dalam mendefinisikan kebijakan luar negeri suatu negara. Salah satunya adalah dengan memaparkan psikobiografi dan worldview dari individu tersebut. Pertama, menggunakan metode psikobiografi. Secara umum, psikobiografi adalah mempelajari sejarah atau life course dari sang pengambil keputusan/ leader. Menurut Post (dalam Hudson 2007: 56), life course dari seorang individu mempunyai peran besar dalam membentuk persepsi individu tentang banyak hal. Termasuk ketika individu tersebut di masa depan menjadi pemimpin dan memutuskan kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri yang diambil oleh negara bisa jadi dipengaruhi persepsi dari leader sebagai individu. Post (2003: 102) menyebutkan poin apa saja yang harusnya dibahas ketika peneliti hendak memaparkan psikobiografi dari seorang pemimpin negara atau leader. Yaitu: latar belakang sejarah dan budaya, keluarga, karir profesional, dan pendidikan.

(1) Latar belakang sejarah dan budaya. Yudhoyono lahir dari latar belakang keluarga aristokratik atau priyayi (Fealy t.t.). Selain berafiliasi dengan etnis Jawa secara kesukuan, Yudhoyono adalah penganut agama Islam. Identitas keislaman sangat melekat dan terlihat dalam keseharian Yudhoyono, termasuk ketika Yudhoyono telah menjadi pemimpin. Yudhoyono sangat meneladani kisah kepemimpinan Nabi dalam Islam, yaitu Nabi Muhammad. Contohnya adalah tentang Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah berisi pelajaran untuk mementingkan faktor timing ketika hendak memutuskan sesuatu (Djalal 2009: 230-239). Yang membuat identitas keagamaan menjadi terlihat dengan jelas dalam diri Yudhoyono adalah refleksinya dalam berdoa. Djalal (2009: 256-257), mengatakan bahwa berdoa adalah hal yang paling sering dilakukan Yudhoyono ketika dihadapkan berbagai macam situasi.

(2) Keluarga. Yudhoyono lahir di Pacitan, Jawa Timur pada 9 September 1949. Sebagaimana dipaparkan pada paragraf sebelumnya, keluarga Yudhoyono adalah keluarga priyayi atau aristokratik yang berasal dari suku Jawa. Keputusan Yudhoyono untuk berkiprah di dunia militer (sebelum menjadi presiden) sangat dipengaruhi oleh sang ayah yang berprofesi sebagai tentara pangkat menengah Republik Indonesia. Yudhoyono menikah dengan Kristiani Herawati, yang merupakan putri dari jenderal berpengaruh Republik Indonesia, Sarwo Edhie Wibowo. Menurut Fealy (t.t.), pernikahan Yudhoyono dengan Kristiani Herawati ini adalah salah satu variabel yang memperlancar karir militer Yudhoyono.

(3) Pendidikan. Yudhoyono mempunyai latar belakang pendidikan yang beragam dan luas. Namun yang akan penulis paparkan disini hanyalah latar belakang pendidikan Yudhoyono hingga tahun 2009. Yaitu latar belakang yang

kemungkinan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi Yudhoyono mengawal Indonesia dalam melakukan ratifikasi Protokol Kyoto komitmen pertama pereduksian emisi karbon. Selain merupakan lulusan terbaik Akademi Militer tahun 1973, Yudhoyono meraih beberapa gelar pendidikan tinggi, yaitu: lulusan S2 jurusan Manajemen dari Webster University di St. Louis, Amerika Serikat; lulusan S3 (doktor) di jurusan Ekonomi Pertanian, Institut Pertanian Bogor tahun 2004; meraih gelar Doctor Honoris Causa dari Webster University (Amerika Serikat) dalam bidang Hukum tahun 2005, dari Thammasat University (Thailand) dalam bidang Ilmu Politik tahun 2005, serta dari Keio University (Jepang) dalam bidang Media dan Pemerintahan tahun 2006 (WCES t.t.). Dalam perjalanannya mendapatkan berbagai gelar akademik ini, bakat kepemimpinan Yudhoyono, sudah mulai tumbuh. Seperti misalnya ketika Yudhoyono menjadi ketua observasi militer pasukan perdamaian PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) di Bosnia dan Herzegovina pada tahun 1995 (Fealy t.t.).

(4) Karir Profesional dan Perjalanan Sebagai Pemimpin. Yudhoyono mengawali karir profesionalnya dalam dunia militer setelah menjadi lulusan terbaik Akademi Militer tahun 1973. Karir militer Yudhoyono terbilang cukup melejit, dengan cepat Yudhoyono mendapatkan reputasi sebagai thinking general dengan mandat reformis yang kuat (WCES t.t.). Sepanjang karir militernya, Yudhoyono memperoleh banyak pengalaman bertugas di luar negeri, seperti: mengikuti pelatihan militer di Amerika Serikat pada tahun 1980an dan 1991; serta menjadi ketua observasi militer pasukan perdamaian PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) di Bosnia dan Herzegovina pada tahun 1995. Setelahnya Yudhoyono menjabat menjadi kepala bidang sosial dan politik Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebelum akhirnya meninggalkan karir politik pada jabatan letnan jenderal tahun 2000 (Fealy t.t.).

Karir politik Yudhoyono dimulai ketika ia mendapatkan jabatan strategis dalam kabinet pemerintahan Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri tahun 2000 hingga 2004. Selain itu, Yudhoyono juga mendirikan partai politik yaitu Partai Demokrat pada tahun 2002. Pendirian partai politik inilah yang kemudian menjadi titik penting karir politik Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden. Pada tahun 2004 bersama Partai Demokrat, Yudhoyono memenangkan pemilihan umum presiden mengalahkan Megawati Soekarnoputri dengan perolehan suara 61 persen dari keseluruhan total pemilih. Yudhoyono merupakan presiden pertama dalam sejarah Indonesia yang dipilih langsung oleh rakyat (Fealy t.t.).

Dalam kiprahnya menjadi presiden, Yudhoyono dikenal sebagai pemimpin yang mempunyai kemampuan profesional dalam mengembalikan stabilitas dan kemakmuran negara Indonesia atau crisis management leader (Fealy t.t.). Misalnya saja setelah bencana tsunami pada tahun 2004 di Aceh, bencana gempa bumi, gunung meletus, krisis keuangan 2008, separatisme, kasus terorisme, dll. Yudhoyono dianggap berhasil memberikan peningkatan pada ekonomi nasional. Karena keberhasilannya ini, Yudhoyono mendapat mandate untuk menjabat sebagai presiden Indonesia selama dua periode antara tahun 2004 hingga 2012 (Fealy t.t.). Kendati demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia semasa pemerintahan Yudhoyono cenderung mengalami penurunan dan inflasi

mengalami peningkatan. Selain itu, keadaan partai politik buatan Yudhoyono juga mendapatkan masalah, yaitu terkuaknya skandal korupsi oleh beberapa anggota (Fealy t.t.).

Di kancah internasional, karir Yudhoyono juga bisa dibilang memuaskan. Yudhoyono berhasil memberikan membawa Indonesia dalam forum-forum internasional seperti G-20 pada tahun 2008, yang merupakan pertemuan pertama dari forum ekonomi internasional. World Chinese Economic Summit memandang hal ini sebagai satu pencapaian yang luar biasa mengingat sepuluh tahun sebelumnya Indonesia terpuruk secara ekonomi karena mengalami krisis finansial tahun 1998. Selain itu, Yudhoyono juga menempatkan lingkungan kedalam prioritas utama kebijakan dan agenda luar negeri Indonesia. Membuatnya mendapatkan julukan presiden Indonesia paling hijau sepanjang sejarah. Salah satu jargon yang dianutnya dalam menerapkan kebijakan pembangunan Indonesia selama dia menjabat menjadi presiden adalah: pro-growth, pro-job, pro-poor, pro-environment (WCES t.t.).

Lebih jauh, Yudhoyono juga membawa Indonesia untuk terlibat aktif dalam diplomasi perubahan iklim. Indonesia pada tahun 2008 berhasil menjadi tuan rumah dari konvensi perubahan iklim yang merupakan pertemuan tahunan dari negara anggota Protokol Kyoto. Selain kiprah dalam Protokol Kyoto, Yudhoyono juga merupakan seorang advokat dalam manajemen hutan berkelanjutan. Yudhoyono juga mendapatkan banyak penghargaan dalam bidang lingkungan hidup, baik dalam level nasional maupun internasional (WCES t.t.). Pemberian penghargaan ini menurut penulis merupakan wujud diakuinya kiprah lingkungan Yudhoyono.

Worldview Susilo Bambang Yudhoyono

Menurut Post (2003) dalam Hudson (2007: 55), untuk memberikan presentasi psikologis yang lebih komprehensif terkait peran seorang leader dalam kebijakan luar negeri tertentu, perlu ditambahkan penjelasan lain selain paparan psikobiografi. Post, merekomendasikan pengkaji hubungan internasional untuk juga memperhatikan aspek worldview atau bagaimana pandangan leader tentang dunia internasional. Dalam worldview, akan dijelaskan tentang: (1) konsep kepemimpinan apa saja yang menjadi pedoman leader dalam menghadapi setiap permasalahan dan fenomena yang ada. (2) Policy views, yaitu pandangan leader tentang fenomena-fenomena yang ada secara umum, dan fenomena terkait kebijakan apa yang paling menarik minat leader (Post 2003: 103). Dengan memaparkan psikobiografi dan worldview dari Susilo Bambang Yudhoyono, penulis akan menjelaskan bagaimana Yudhoyono sebagai leader mempengaruhi politik luar negeri Indonesia dalam Protokol Kyoto, khususnya ketika Indonesia memutuskan untuk secara sukarela mereduksi emisi karbon dalam komitmen pereduksian pertama. Dalam worldview, terdapat dua poin yang hendak dibahas penulis, yaitu terkait konsep yang dipahami Yudhoyono tentang kepemimpinan dan policy views (Post 2003).

(1) Konsep Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Yudhoyono mempunyai beberapa konsep kepemimpinan yang menjadi acuan dalam merespon setiap permasalahan atau fenomena politik yang sedang terjadi. Konsep kepemimpinan tersebut adalah konsep yang dipahami dan membentuk persepsi Yudhoyono hingga tahun 2009, yaitu hingga Indonesia menyatakan akan melakukan pereduksian emisi karbon pada komitmen pertama Protokol Kyoto. Antara lain: konsep kepemimpinan yang menghadapi masalah secara real time; konsep kepemimpinan yang positif, optimis, dan berani mengambil resiko; konsep kepemimpinan yang selalu thinking outside the box; konsep kepemimpinan yang mission oriented; konsep kepemimpinan yang nasionalis dan internasionalis; dan konsep kepemimpinan yang ramah dengan slogannya yang masyur, thousand friends zero enemy (Djalal 2009).

(2) Policy views. Dalam jurnal ini, penulis tidak akan membahas keseluruhan policy views yang dimiliki Yudhoyono. Peneliti hanya akan membahas policy views yang berhubungan dengan lingkungan hidup karena sesuai dengan bahasan penelitian ini, yaitu kebijakan luar negeri Indonesia terkait keputusan mereduksi emisi karbon komitmen pertama dalam Protokol Kyoto. Apakah benar Yudhoyono memberikan fokusnya kepada isu-isu lingkungan ketika menjabat menjadi presiden? Menurut World Chinese Economic Summit (t.t.), memang benar adanya bahwa isu lingkungan hidup adalah salah satu isu yang menjadi sorotan Yudhoyono. Banyak sekali bukti yang membenarkan pernyataan ini. Kiprah Yudhoyono dalam Protokol Kyoto, kebijakan-kebijakan terkait penanggulangan deforestasi, program Penanaman Satu Juta Pohon, kerjasama bilateral dengan Norwegia dalam mengurangi deforestasi, dll.

Analisis dan Kesimpulan Psikobiografi dan Worldview Susilo Bambang Yudhoyono

Dari aspek-aspek psikobiografi yang ditawarkan Jerrold M. Post (2003) dan berdasarkan pemaparan psikobiografi tersebut, menurut penulis yang paling mempengaruhi persepsi Yudhoyono dalam mengambil keputusan terkait kebijakan luar negeri Indonesia dalam ratifikasi komitmen Protokol Kyoto periode pertama antara lain. (1) Pendidikan. Yudhoyono menempuh pendidikan tinggi yang beragam mulai dari pendidikan militer, pendidikan master, dan peraih gelar Doctor Honoris Clausa dalam berbagai bidang dan dari berbagai universitas. Perolehan gelar ini membuat Yudhoyono menjadi mempunyai kualifikasi tentang pengetahuan dan keahlian tertentu, sebab proses pendidikan pastinya memberikan value adding bagi diri pelaku pendidikan itu sendiri. Latar belakang pendidikan ini membuat Yudhoyono bertransformasi menjadi leader yang strategis dan mampu memetakan dan memajemen krisis dengan baik. Perubahan iklim merupakan sebuah krisis global, dan Protokol Kyoto merupakan solusi paling meyakinkan yang bisa diupayakan negara, Yudhoyono merespon krisis ini dengan melakukan ratifikasi terhadap komitmen pereduksian gelombang pertama. Melihat krisis tersebut sebagai peluang yang bisa diambil untuk menjadikan kondisi lingkungan Indonesia menjadi lebih baik.

(3) Karir profesional. Perjalanan panjang karir Yudhoyono memberikan banyak pengalaman mengenai bagaimana merespon suatu permasalahan. Pengalaman tersebut melahirkan persepsi yang sudah terbukti kebenarannya. Selain itu, perjalanan karir Yudhoyono yang luas dan selalu berkembang dari satu bidang ke bidang lain juga membuat Yudhoyono mampu secara objektif memetakan isu mana yang penting dan memerlukan perhatian khusus dan isu mana yang tidak. Termasuk dalam merespon Protokol Kyoto, Yudhoyono merespon permasalahan ini berdasarkan pengalaman dan persepsinya. Yudhoyono karena pengalamannya dilapangan yang banyak, membuatnya tidak gampang goyah ketika memutuskan sesuatu mempunyai pegangan dan pendiriannya sendiri, sebuah wujud dari kuatnya karakter leader dalam diri Yudhoyono. Yudhoyono adalah seorang Jenderal TNI yang dikenal sebagai thinking general, atau jenderal ahli strategi, yang lebih mengutamakan siasat atau diplomasi daripada mengangkat senjata dalam merespon sebuah masalah. Ketika menjabat menjadi presiden, kecenderungan berdiplomasi dengan cara yang soft masih terbawa dan menjadi ciri khas Yudhoyono. Beliau bahkan mendapat julukan crisis management president karena kepemimpinannya walaupun diuji banyak hambatan, tetap bisa tertangani dengan apik. Contoh nyata dari krisis yang berhasil diselesaikan Yudhoyono adalah menunjukkan kepiawaiannya dalam mengatur strategi adalah kasus tsunami Aceh. Protokol Kyoto juga adalah merupakan terobosan bagi karir kepresidenan Yudhoyono. Dengan memilih untuk berfokus kepada bidang lingkungan, Yudhoyono menurut penulis sangat pandai dalam memetakan suatu fenomena yang low politics, tidak membutuhkan hard power untuk mencapainya, namun krusial dan on spotlight.

Selanjutnya, peneliti juga menegaskan bahwa worldview yang di dalam nya terdapat konsep kepemimpinan leader, dan policy views juga mempengaruhi Yudhoyono dalam pengambilan kebijakan luar negeri Indonesia di Protokol Kyoto. Pertama konsep kepemimpinan Yudhoyono, yaitu. (a) Menghadapi masalah secara real time. Yudhoyono membawa Indonesia untuk meratifikasi Protokol Kyoto walaupun sebenarnya Indonesia tidak mempunyai kewajiban akan hal itu karena Yudhoyono merasa harus segera menangani krisis perubahan iklim secara real time untuk menghindari terjadinya katastrofi di masa mendatang. Apalagi setelah melihat stagnansi progres Protokol Kyoto pada tahun-tahun sebelumnya. Sebagai ahli strategi, selain merasa prihatinan, Yudhoyono juga memandang isu lingkungan yang underrated ini sebagai peluang bagi Indonesia go international khususnya dalam politik lingkungan hidup. Untuk itu, Yudhoyono merasa harus segera menanggapi masalah ini secara real time. Sebab peluang kadang tidak datang dua kali.

Selain itu, keputusan Indonesia dalam mereduksi emisi karbon ini ini juga merupakan perwujudan dari kepemimpinan Yudhoyono yang (b) positif, optimis, dan berani mengambil resiko. Sebab sebelumnya tidak ada negara berkembang yang berani melakukan apa yang dilakukan oleh Indonesia dalam ratifikasi Indonesia di Protokol Kyoto ini.

Selain itu sifat positif, optimis, dan berani mengambil resiko ini dilakukan karena keyakinan Yudhoyono bahwa setiap krisis selalu terdapat peluang. Dan benar juga, setelah meratifikasi, kerjasama bilateral Indonesia

dengan negara-negara maju terbuka lebar, ini merupakan peluang bagi revitalisasi lingkungan hidup Indonesia. Selanjutnya, menurut penulis, ratifikasi Indonesia dalam Protokol Kyoto ini juga dipengaruhi oleh konsep kepemimpinan Yudhoyono yang (c) *thinking outside the box* sebab belum pernah dilakukan sebelumnya dan merupakan kebijakan yang berani bagi negara berkembang seperti Indonesia. Namun keberanian Yudhoyono tersebut tidak dilakukan sembarangan dan selalu dengan melihat dulu kemungkinan-kemungkinan, sebab Yudhoyono juga adalah pemimpin yang (d) *mission oriented*. Tidak mudah dipengaruhi ketika sudah memutuskan sesuatu, walaupun kritik dan hambatan selalu ada.

Selanjutnya, keputusan mengurangi emisi karbon dalam skema Protokol Kyoto ini juga merupakan wujud (e) internasionalisme (karena berhubungan dengan kebijakan luar negeri), sekaligus nasionalisme (karena ada peluang besar bagi Indonesia untuk bisa memperbaiki keadaan lingkungan hidup dalam negeri), dan juga merupakan wujud dari kepemimpinan Yudhoyono yang ramah dengan slogan *thousand friends zero enemy*, sebab walaupun merupakan sebuah keputusan yang progresif, kebijakan ini tidaklah memancing amarah atau resistensi dari negara lain. Terakhir, ketika melihat *policy views* dari seorang Yudhoyono, maka bisa dilihat salah satu fokus pengambilan kebijakan yang pernah dilakukan Yudhoyono ketika menjabat menjadi presiden Indonesia adalah lingkungan hidup. Banyak sekali contoh program kerja dan terobosan yang sudah peneliti tuliskan sebagai bukti bahwa Yudhoyono mempunyai ketertarikan lebih besar terhadap isu lingkungan daripada isu lainnya.

Sifat yang positif, optimis, dan berani mengambil resiko, juga ditunjukkan Yudhoyono ketika ia mengatakan, sebagaimana dikutip Purnomo (2012: 53) bahwa dalam melaksanakan solusi terkait perubahan iklim, negara tidak boleh gagal, sebab “*failure is not an option*”. Selain itu, dalam pertemuan negara-negara G-20 pada tahun 2009 di Amerika Serikat, Yudhoyono kembali mengobarkan optimisme dengan menawarkan konsep ‘ekonomi rendah karbon’ sebagai solusi dalam menghadapi tantangan perubahan iklim sekaligus tantangan kesejahteraan ekonomi yang harus dipenuhi negara (Purnomo 2012: 115).

Kendati demikian, dalam paparan psikobiografi, peneliti kekurangan menemukan korelasi antara poin mana saja dari *life course* Yudhoyono yang akhirnya membentuk persepsi Yudhoyono ketika telah menjadi presiden dan mengeluarkan sebuah kebijakan luar negeri. Peneliti, melalui data yang diperoleh, yakin bahwa aspek yang paling mempengaruhi persepsi Yudhoyono adalah latar belakang pendidikan dan perjalanan karirnya. Walaupun tidak secara spesifik mengarah kepada pembentukan karakter yang ‘cinta lingkungan’, namun latar belakang pendidikan dan perjalanan karir Yudhoyono secara umum telah membawanya menjadi seorang *strategist* ulung yang mampu memetakan fenomena. Mana yang sekiranya tidak perlu terlalu mengundang konflik, namun bisa memberikan banyak sorotan internasional, dan tentu saja, keuntungan bagi Indonesia.

Sumber Cetak

- Breuning, Marijke., 2007, *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction*, Palgrave MacMillan, New York, Bab I.
- Djalal, Dino Patti., 2009, *Harus Bisa Seni Memimpin Ala SBY*, Jakarta.
- Hudson, Valerie M., 2007, Chapter 2, *The Individual Decision Maker: Political Psychology of World Leader*, dalam Hudson, Valerie M., 2007, *Foreign Policy Analysis, Classic and Contemporary Theory*, Rowman & Littlefield, hal. 37-38.
- O'Neill, Kate., t.t., Bab 4: *State Led Global Environmental Government*, dalam O'Neill, Kate., 2009, *The Environment and International Relations*, Cambridge University Press, Cambridge, hal. 71-134.
- Post, Jerrold., 2003, *The Psychological Assessment of Political Leaders*, dikutip dalam Hudson, Valerie M., 2007, Chapter 2, *The Individual Decision Maker: Political Psychology of World Leader* dalam Hudson, Valerie M., 2007, *Foreign Policy Analysis, Classic and Contemporary Theory*, Rowman & Littlefield, hal. 55-56.
- Purnomo, Agus., 2012, *Menjaga Hutan Kita Pro Kontra Kebijakan Moratorium Hutan Gambut*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, hal. 11-12.
- Wangke, Humphrey., t.t., Bab II *Protokol Kyoto: Perjuangan Setengah Hati*, dalam Wangke, Humphrey., 2011, *Mencari Solusi atas Perubahan Iklim*, Pusat Pengkajian dan Pengelolaan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR-RI, Jakarta, hal. 21-39.
- Warne, Kennedy., 2015, *Melawan Pasang Laut Bagaimana Menyikapinya*, dalam *National Geographic Indonesia*, November 2015, hal. 90-99.

Sumber Online

- Fealy, Greg., t.t., *Susilo Bambang Yudhoyono, President of Indonesia*, [Online], diakses pada 2 Juli 2017, Tersedia di:
<https://www.britannica.com/biography/Susilo-Bambang-Yudhoyono>.
- Friedrich, Johannes., et al, 2017, *This Interactive Chart Explains World's Top 10 Emitters, and How They've Changed*, [Online], diakses pada 2 Juli 2017, Tersedia di: <http://www.wri.org/blog/2017/04/interactive-chart-explains-worlds-top-10-emitters-and-how-theyve-changed>.
- Global Green Growth Institute, t.t., *Overview*, [Online], diakses pada 15 Juni 2016, Tersedia di: <http://gggi.org/about-gggi/background/organizational-overview/>.
- Post, Jerrold., 2003, *Assessing Leader at a Distance: The Political Personality Profile*, dalam Post, Jerrold., ed, (2003), *The Psychological Assessment of Political Leaders*, Ann Arbor, The University of Michigan Press, [Online], Tersedia di:
http://www.cnqzu.com/library/To%20Organize/Books/%5BJerrold_M.Post%5D_The_Psychological_Assessment_of_Political_Leaders.pdf.
- UNFCCC, t.t., *Kyoto Protocol*, [Online], diakses pada 3 Juli 2017, Tersedia di: http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php.

UNFCCC, t.t., Parties and Observers, [Online], diakses pada 21 Desember 2016, tersedia di: http://unfccc.int/parties_and_observers/items/2704.php.

UNFCCC, t.t., Bali Climate Change Conference – December 2007, [Online], diakses pada 8 Juni 2016, Tersedia di:
http://unfccc.int/meetings/bali_dec_2007/meeting/6319.php.

World Chinese Economic Forum, t.t., H.E. Susilo Bambang Yudhoyono, Former President of Indonesia/ President of Green Growth Institute, [Online], diakses pada 3 Juli 2017. Tersedia di:
<http://www.wceforum.org/speakers/his-excellency-susilo-bambang-yudhoyono/>.

Sumber Lainnya

Wicaksana, Wahyu., 2014, Konsep Dasar: Kebijakan Luar Negeri dan Evolusi dari Kebijakan Luar Negeri, perkuliahan minggu ke-2 11 September 2014: Perbandingan Politik Luar Negeri, Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, tidak dipublikasikan.